

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.P. Parlindungan. 2008. *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Cet. 9. Mandar Maju: Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Achmad Ali Chomzah, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Achmad Ali Chomzah, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Achmad Ali Chomzah, *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia*,
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Mafia Tanah*, Binacipta, Bandung, 2018.
- Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 158.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.
- Dian Aries Mujiburohman, *Penegakan Hukum Penertiban & Pendaaygunaan Tanah Terlantar*, STPN Press, Yogyakarta, 2019.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1989.
- Florianus Sp. Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*. Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2007.
- G.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendaya Gunanaan Tanah*, Jakarta, Bina Aksara,1985.
- H. M. Arba. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.

- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020.
- Moh. Hatta, *Bab-bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak atas Tanah*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2014.
- Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*, Jakarta, Citra Media, 2007.
- Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2012.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis dan Disertasi*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004.
- Syarifah M, "Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Dalam Era Otonomi Daerah Pada Masyarakat Suku Sakai Di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, Tesis", Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2010.
- Tri Chandra Aprianto, *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan*, STPN Press, Yogyakarta, 2016
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Media, 2006.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban dan Kawasan Tanah Terlantar.
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33.
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Perkaban Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

### **Tesis**

Indra Ardiansyah. 2010. *Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Tanah Terlantar.* Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.

Lianton Vicco Yunior. 2019. *Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar.* Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Airlangga. Surabaya.

### **Jurnal**

Saripudin, 2015. *Konsep Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam Perspektif Reforma Agraria* Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11 Nomor 22. Pasca Sarjana Universitas Widyagama Mahakam Samarinda Indonesia.

- Atik Rochaeni, 2019. *Penertiban Tanah Terlantar dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Di Indonesia* Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, Vol.13 Nomor 1. Pasca Sarjana Universitas Nurtanio Bandung.
- Nirwana, Farida Patittingi, Sri Susyanti Nur, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak atas Tanah Sesungguhnya dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Rincik Palsu (Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung RI No 482/PK/Pdt/2014 dan No 560K/PID/2008, Pagaruyuang Law Journal*, Vol.1 Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Indonesia.
- Desi Nurkristia, 2021. *Asas Kepastian Hukum Dalam Kedudukan Girik terhadap Sertipikat Hak atas Tanah* Jurnal Suara Hukum, Vol.3 Nomor 2. Pasca Sarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Faisal, Lalu Muhammad, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Journal Ilmiah Rinjani, Vol.5 Nomor 1 Universitas Gunung Rinjani.